ABSTRAK

Skripsi dengan judul "Analisis Hukum Islam terhadap Putusan Pengadilan Agama Malang Nomor:297/Pdt.G/2010/PA.Mlg Perkara Gugat Waris ini hanya membahas dua rumusan masalah yaitu Bagaimana dasar dan pertimbangan hukum majelis hakim Pengadilan Agama Malang dalam putusan Nomor : 297/Pdt.G/2010/PA.Mlg. tentang ditolaknya istri sirri sebagai ahli waris)? dan Bagaimana analisis hukum Islam terhadap dasar dan pertimbangan hukum majelis hakim Pengadilan Agama Malang dalam putusan Nomor : 297/Pdt.G/2010/PA.Mlg tentang ditolaknya istri sirri sebagai ahli waris)?.

Data penelitian dihimpun dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi kepustakaan serta didukung data lapangan dengan teknik dokumentasi dan wawancara. Selanjutnya data yang telah dihimpun dianalisis dengan metode deskriptif analitis, yaitu suatu metode yang memaparkan dan menggambarkan data yang telah terkumpul dengan menggunakan pola pikir induktif.

Berdasarkan penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa dalam putusan PA Malang Nomor : 297/Pdt.G/2010/PA.Mlg. Majlis hakim menetapkan bahwa istri sirri tidak bisa mendapatkan harta waris karena tidak mempunyai bukti berupa kutipan akta nikah yang menjadikan pernikahan itu sah di dalam hukum di Indonesia. Hal ini berdasarkan pasal 7 KHI, Jadi perkawinan sirri tersebut dianggap tidak pernah terjadi dan tidak mempunyai akibat hukum.

Dasar hukum dan pertimbangan majlis hakim sudah tepat karena sudah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Namun hal ini berbeda dengan hukum Islam pada masa dahulu yaitu istri sirri itu berhak mendapatkan harta waris karena pernikahannya itu sah dan tidak batal. Pernikahan dalam Islam itu sah apabila telah memenuhi rukun-rukun serta syarat-syarat pernikahan dan juga tidak adanya halangan pernikahan seperti satu nasab dan sebagainya. Sehingga dalam pernikahan tersebut memiliki hubungan perkawinan yang menjadi salah satu penyebab dari adanya kewarisan.

Dari kesimpulan diatas seharusnya hakim dalam memutus perkara itu harus lebih teliti dan hati-hati dan tidak hanya berpaku pada satu undang-undang yang telah ada akan tetapi harus menggunakan pendapat dari pakar hukum dan juga maslahah mursalah dengan tujuan kemaslahatan. Karena hakim mempunyai hak khusus untuk menggunakan pendapatnya dalam memutuskan suatu perkara. Serta seharusnya prosedur dalam isbat nikah harus di revisi lagi yaitu, mempermudah sidang itsbat nikah supaya lebih menimbulkan kemaslahatan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id